



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
PAPUA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 WAMENA
Jl. Yos Sudarso No. 26, Wamena 99511; TELEPON (0969) 31348; FAKSIMILI (0969) 31324; SITUS
www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/wamena/

NOTA DINAS
NOMOR ND-85/KPN.3406/2026

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Wamena
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Percepatan Pembangunan Papua Anggota BPP
Provinsi Papua Pegunungan Periode Bulan Februari 2026
Tanggal : 11 Maret 2026

Sehubungan dengan nota dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua nomor ND-176/WPB.34/2025 tanggal 6 Februari 2025 dan surat Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua nomor S-3/SETBPP/JYP/JYP.02/2025 tanggal 5 Februari 2025, dengan ini disampaikan Laporan Percepatan Pembangunan Papua Anggota BPP Provinsi Papua Pegunungan Bulan Februari Tahun 2026 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Wamena (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Deni Herdianto

Tembusan:
1. Kepala Bagian Umum
2. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II





**LAPORAN KEGIATAN BPP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
BULAN FEBRUARI TAHUN 2026**



TIM PENYUSUN

BP3OKP PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Pengarah	:	Hantor Matuan, S.IP.
Anggota Kelompok Kerja Papua Polhukam	:	Fransiscus Elosak,S.H.,M.H
Anggota Kelompok Kerja Papua Cerdas	:	Paul Wetipo,S.Pd
Anggota Kelompok Kerja Papua Sehat	:	Gaad Piranid Tabuni, SP.,M.M.
Anggota Kelompok Kerja Papua Produktif	:	Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Meisly Mariana Kombong, S.AP.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Otniel Elokpere, S.Pd.
Staff PPNPN BPP Provinsi Papua Pegunungan	:	Teo Aprianus Dini

DAFTAR ISI

HALAMAN UTAMA	1
TIM PENYUSUN	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Ringkasan Kelembagaan	5
1.3.1 Definisi	5
1.3.2 Struktur Kelembagaan	6
1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan	6
1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja	7
BAB II PEMBAHASAN	8
2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan.....	8
2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan.....	17
2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto, S,Sos.,M.Si	18
2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Paul Wetipo, S,Pd).....	30
2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan Koordinator: Gaad Piranid Tabuni,SP.,M.M)	32
BAB III PENUTUP	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi khusus dilaksanakan dalam rangka tercapainya kesejahteraan rakyat, terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, penghormatan terhadap Hak Asasi khususnya bagi Orang Asli Papua (OAP). Otonomi Khusus di Papua telah memasuki babak baru. Setelah berjalan 20 tahun, Pemerintah Pusat melanjutkan pemberian Otonomi Khusus bagi Papua dengan diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam peraturan tersebut, diamanatkan pada Pasal 68A bahwa perlu dibentuk badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dalam rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK). Dalam menjalankan amanat tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua (BPP).

Sesuai dengan Perpres 121 Tahun 2022, BPP memiliki tugas utama dalam melaksanakan SHEK dalam pelaksanaan Otsus Papua. Badan tersebut diketuai oleh Wakil Presiden RI dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, serta satu orang Perwakilan OAP dari setiap Provinsi Papua DOB Provinsi Papua Pegunungan. Selain itu dalam pelaksanaannya, akan dibantu pula oleh Sekretaris Eksekutif di Jakarta dan Sekretariat Badan Pengarah Papua yang berlokasi di Papua, Kelompok Kerja, serta Kelompok Ahli. Badan yang baru dibentuk tersebut memiliki tantangan yang cukup berat, seperti kompleksitas koordinasi antara lembaga dan para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Otsus Papua, memastikan partisipasi aktif dari tokoh-tokoh atau masyarakat Papua, dan memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua serta menjembatani pemahaman di antara mereka dalam efektivitas komunikasi.

Arah percepatan pembangunan telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Rencana induk tersebut memuat berbagai target dengan capaian dan dampak yang terukur. Agar pelaksanaan tugas BPP dapat sejalan dengan rencana induk, perlu disusun Rencana Kegiatan dan Program Kerja BPP. Rencana kegiatan dan program kerja ini memuat Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, dasar hukum dan ringkasan kelembagaan, Bab II yang terdiri atas target outcome, rencana kegiatan dan program kerja, serta Bab III Penutup. Rencana kegiatan dan program kerja menjadi acuan bagi Badan Pengarah Papua, khususnya bagi Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugas SHEK percepatan Pembangunan dalam rangka Otonomi Khusus Papua.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

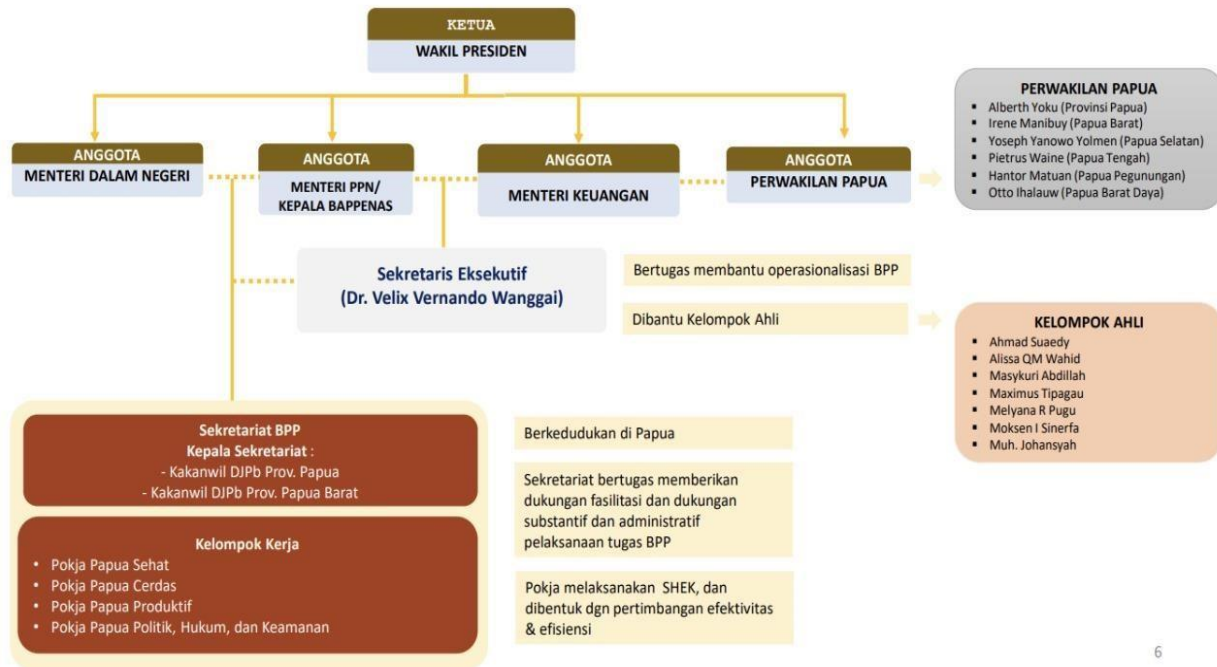
2. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
7. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua;
8. Keputusan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2024 tentang Keanggotaan, Rincian Tugas dan Fungsi, Serta Pembidangan Tugas Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua;
9. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER-2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua;
10. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-3/SETBPP/JYP/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Kelompok Kerja Badan Pengarah Papua.
11. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor KEP-1/SET/JYP/2025 tentang Penetapan Tim Dukungan Administratif dan Tim Dukungan Substantif Sekretariat Badan Pengarah Papua.

1.3 Ringkasan Kelembagaan

1.3.1 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.3.2 Struktur Kelembagaan



6

1.3.3 Uraian Tugas dan Fungsi Kelembagaan

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - b. Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - c. Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - d. Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk

- Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
- e. Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.3.4 Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja

Dalam rangka melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi dibentuk Kelompok Kerja pada Sekretariat Badan Pengarah Papua. Kelompok Kerja mempunyai tugas membantu Badan Pengarah Papua dalam:

- a. Melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua; dan
- b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh kementerian/lem.baga dan pemerintah daerah Provinsi Papua berdasarkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kelompok Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Konsultasi dan kordinasi dengan seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. Koordinasi dan kerja sarna dengan kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Papua dalam pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- d. Pengolahan dan pelaporan data serta informasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua;
- e. Membantu Sekretariat Badan Pengarah Papua dalam komunikasi publik antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota" dengan masyarakat di Provinsi Papua;
- f. Menyusun laporan kelompok kerja; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Badan Pengarah Papua.

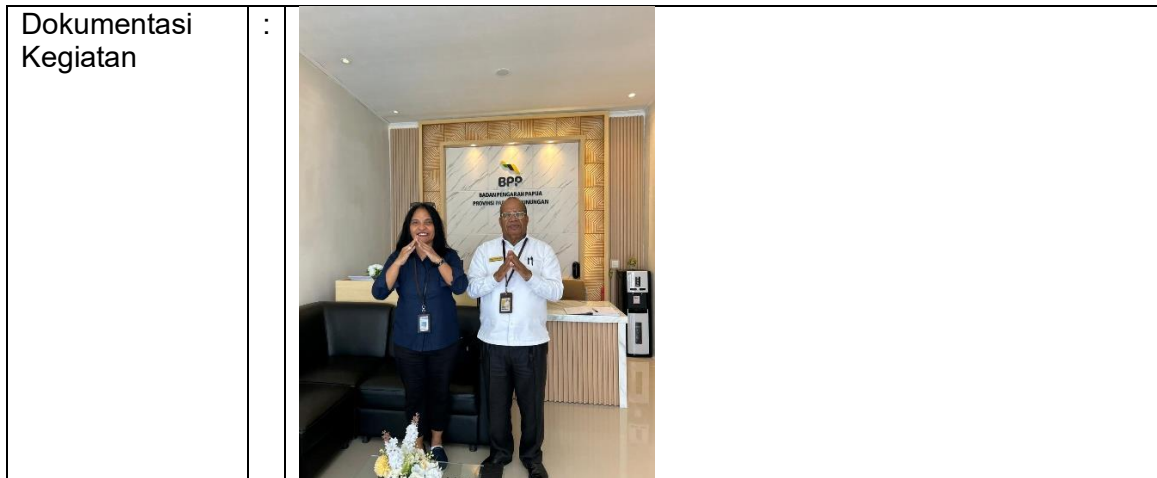
BAB II PEMBAHASAN

Kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya pada Bulan Februari tahun 2026 antara lain:


2.1 Kegiatan Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Hantor Matuan,S.IP.

Kegiatan 1	
Nama Kegiatan	: Pertemuan Bersama Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: Kegiatan dilaksanakan pada 04 Februari 2026, bertempat di Kantor BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan ini bertujuan untuk membangun koordinasi antara Balai Bahasa Provinsi Papua dengan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka persiapan pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah yang direncanakan akan dilaksanakan pada Agustus 2026.
Peserta Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Balai Bahasa Provinsi Papua, Ibu Valentina Lovina Tanate • Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	: Sinkronisasi, Koordinasi.
Misi/Keterangan	: Anggota BP3OKP
Hasil Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> • Dalam pertemuan tersebut, Ibu Valentina Lovina Tanate menyampaikan bahwa kunjungannya ke Wamena dalam rangka kegiatan di Kampus UNAIM YAPIS Wamena, sekaligus menyempatkan diri untuk melakukan pertemuan dengan BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan. • Pada kesempatan tersebut dibahas rencana pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026. Balai Bahasa Provinsi Papua berharap adanya dukungan dari BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan, khususnya dalam memberikan masukan terkait perwakilan peserta dari wilayah Papua Pegunungan yang dapat dilibatkan dalam kegiatan kongres tersebut.
Rencana Tindaklanjut	: <ul style="list-style-type: none"> • Perlu dilakukan koordinasi lanjutan antara Balai Bahasa Provinsi Papua dan BP3OKP terkait teknis pelaksanaan serta keterlibatan peserta dari daerah.



Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan dan Audiensi BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan bersama Bersama Pengurus/Pendamping Sekolah Adat Hugulama
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan dilaksanakan pada 06 Februari 2026, bertempat di Kantor Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Mendengarkan aspirasi pengurus dan pendamping Sekolah Adat Hugulama terkait pengembangan pendidikan berbasis kearifan lokal. • Membahas perkembangan dan kendala yang dihadapi dalam pengurusan izin operasional sekolah adat. • Membangun koordinasi dan kolaborasi antara BP3OKP dengan pengelola sekolah adat dalam mendukung penguatan pendidikan masyarakat adat di Papua Pegunungan.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan • Pokja BPP Provinsi Papua Pegunungan • Ketua dan Pengurus sekolah adat
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi, koordinasi
Misi/Keterangan	:	Anggota BPP bersama Pokja
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurus Sekolah Adat Hugulama menyampaikan apresiasi kepada BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan yang telah menerima dan mendengar aspirasi masyarakat terkait pengembangan pendidikan berbasis kearifan lokal. • Saat ini terdapat 6 (enam) sekolah adat, namun baru 2 (dua) sekolah yang telah memperoleh izin operasional. Pihak pengurus masih berupaya mengurus izin operasional melalui Dinas Pendidikan agar dapat terdaftar sebagai PKBM.

		<ul style="list-style-type: none"> • Dalam proses pengurusan izin operasional masih terdapat kendala administratif di tingkat dinas terkait. • Sekolah Adat Hugulama telah menjalankan berbagai kegiatan pendidikan dan literasi masyarakat, termasuk program Lapak Baca sejak tahun 2020, yang telah membantu masyarakat dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulis. • Selain pendidikan dasar, sekolah adat juga mengembangkan pendidikan berbasis kearifan lokal, seperti pertanian, kerajinan tangan, serta seni dan budaya lokal. • Para guru yang terlibat dalam kegiatan sekolah adat hingga saat ini masih bekerja secara sukarela dan belum menerima honorarium. • Pengurus sekolah juga menyampaikan kebutuhan pembangunan fasilitas gedung serbaguna ramah lingkungan serta dukungan infrastruktur dasar untuk menunjang kegiatan pendidikan. • Sekolah Adat Hugulama juga memiliki rencana untuk mengikuti festival budaya di Osaka, Jepang, serta menyelenggarakan festival sekolah adat secara rutin setiap tahun sebagai bagian dari pelestarian budaya dan pendidikan adat.
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan akan membantu memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya dalam proses pengurusan izin operasional sekolah adat. • Pengurus Sekolah Adat Hugulama diharapkan menyiapkan proposal resmi kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperoleh dukungan program maupun pembiayaan. • Perlu dilakukan penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung pengembangan pendidikan berbasis kearifan lokal. • Perlu adanya dukungan terhadap pembangunan fasilitas pendidikan dan sarana pendukung guna menunjang keberlanjutan kegiatan sekolah adat
Dokumentasi Kegiatan	:	


Kegiatan 3	
Nama Kegiatan	: Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: Dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2026, bertempat di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Kemendikdasmen.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> • Dalam rangka mendukung program prioritas nasional, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan bermutu untuk semua.
Peserta Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> • 6 Anggota BP3OKP • Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas RI • Deputi Sumber Daya Aparatur, Kementerian PAN RB RI • Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI dan pemerintah pusat dan daerah lainnya.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	: SHEK
Misi/Keterangan	: BP3OKP
Hasil Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> • Peserta pertemuan sepakat bahwa penguatan penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan perlu terus didorong melalui gerakan bangga, mahir, dan maju dengan Bahasa Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, pemerintahan, dan ruang publik. • Disepakati pentingnya peningkatan literasi berbasis bahasa dan sastra, baik melalui kegiatan membaca, menulis, maupun pengembangan karya sastra yang dapat memperkaya wawasan kebahasaan serta meningkatkan kemampuan literasi masyarakat. • Pertemuan juga menegaskan pentingnya revitalisasi bahasa daerah sebagai bagian dari upaya pelestarian identitas budaya dan kearifan lokal. Program revitalisasi ini bertujuan agar bahasa daerah tetap lestari dan digunakan oleh generasi muda melalui pembelajaran di sekolah dan aktivitas budaya di masyarakat. • Ditekankan bahwa pelestarian bahasa daerah perlu melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, komunitas adat, serta generasi muda agar penggunaan bahasa daerah dapat terus diwariskan secara berkelanjutan. • Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung program kebahasaan dan kesastraan, khususnya dalam menjaga keseimbangan antara penguatan Bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah.
Rencana Tindaklanjut	: <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pemerintah daerah di Provinsi Papua Pegunungan untuk mendukung program revitalisasi bahasa daerah, terutama bahasa-bahasa lokal yang digunakan oleh masyarakat adat.

	<ul style="list-style-type: none"> • BP3OKP melakukan koordinasi dan monitoring bersama pemerintah provinsi, kabupaten, serta lembaga terkait untuk memastikan program penguatan Bahasa Indonesia dan revitalisasi bahasa daerah dapat berjalan secara berkelanjutan di Papua Pegunungan.
Dokumentasi Kegiatan	

Kegiatan 4	
Nama Kegiatan	: Kunjungan kepala cabang BPJS Wamena ke BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: Dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2026, bertempat di Kantor BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan ini bertujuan untuk penguatan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan otonomi khusus papua di sektor kesehatan serta memperkenalkan diri sebagai kepala cabang baru di BPJS Wamena.
Peserta Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> • Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan • Kepala Cabang BPJS Wamena • Staf BPJS Wamena • Pokja Papua Sehat dan Papua Polhukam BPP Provinsi Papua Pegunungan.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	: SHEK
Misi/Keterangan	: Anggota BP3OKP, Pokja Papua Sehat
Hasil Kegiatan	: <ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan ini berjalan dengan baik, Anggota BP3OKP bersama pokja menyambut dengan hangat kunjungan yang dilakukan oleh kepala cabang BPJS Wamena yang baru serta kunjungan ini menjadi wadah strategis untuk mempererat sinergi dan memastikan implementasi program jaminan kesehatan bagi masyarakat berjalan efektif, tepat sasaran dan berkelanjutan.

Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> Melalui koordinasi yang interaktif dan kolaboratif, BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan bersama BPJS Wamena berkomitmen bersama-sama mendukung pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Pegunungan agar semakin optimal dalam memperkuat layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan Koordinasi BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan tentang Rencana Pembangunan Sekolah bagi Anak Berkebutuhan Khusus/Disabilitas.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Senin, 23 Februari 2026 bertempat di Kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> Membahas rencana pembangunan sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus/disabilitas di Provinsi Papua Pegunungan. Mendorong penyediaan layanan pendidikan yang layak bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Membangun koordinasi antara BP3OKP dan Dinas Pendidikan dalam mendukung pembangunan sekolah khusus di Provinsi Papua Pegunungan. Penyediaan sekolah khusus penting karena anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mereka agar dapat berkembang secara optimal.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Pegunungan Anggota BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan Pokja Papua Cerdas Pokja Papua Sehat
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP, Pokja Papua Cerdas

Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembangunan sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus/disabilitas di Provinsi Papua Pegunungan. • Diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat sekolah khusus bagi anak-anak disabilitas di Provinsi Papua Pegunungan sehingga diperlukan langkah strategis untuk mewujudkannya. • Disepakati bahwa akan dilakukan pertemuan lanjutan dengan Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus untuk mendorong percepatan pembangunan sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Provinsi Papua Pegunungan.
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pertemuan khusus dengan Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. • Menyusun rencana dan proposal pembangunan sekolah bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Provinsi Papua Pegunungan. • Meningkatkan koordinasi antara BP3OKP, Dinas Pendidikan, dan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi pembangunan sekolah tersebut.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 6		
Nama Kegiatan	:	Rapat Koordinasi dan Audiensi bersama Direktorat Jenderal TKPR pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka membahas rencana pembangunan 2.200 unit rumah di delapan kabupaten Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 26 dan 28 Februari 2026, bertempat di Ruang Rapat Kantor BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas rencana pembangunan 2.200 unit rumah di delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. • Memastikan pelaksanaan program pembangunan perumahan berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

		<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pelaksanaan pembangunan yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). • Memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta instansi teknis terkait.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan • Direktorat Jenderal TKPR Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman • Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan • Perwakilan Pemerintah Kabupaten dari delapan kabupaten di Papua Pegunungan • KPPN Wamena • Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Anggota BP3OKP, Pokja Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Tersampainya rencana pembangunan 2.200 unit rumah di delapan kabupaten Provinsi Papua Pegunungan. • Disepakati pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan perumahan. • Ditekankan bahwa pelaksanaan program harus berjalan sesuai regulasi serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. • Program pembangunan perumahan ini diarahkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat penerima manfaat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan koordinasi lanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten untuk mempercepat proses pelaksanaan pembangunan. • Menyusun rencana teknis pelaksanaan pembangunan rumah di masing-masing kabupaten. • BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan melakukan monitoring dan controlling terhadap pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai rencana. • Memastikan pembangunan perumahan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Pegunungan.

<p>Dokumentasi Kegiatan</p>	<p>:</p>		
-----------------------------	----------	--	--

2.2 Kegiatan Pokja Papua Polhukam Provinsi Papua Pegunungan

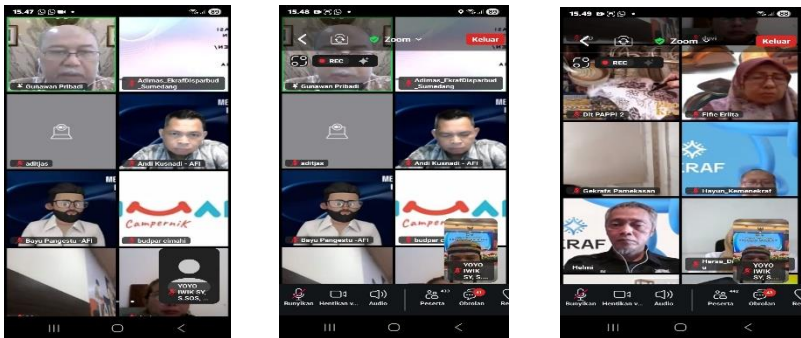
Koordinator: Fransiscus Elosak, S.E.,M.M.

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	NIHIL
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	
Peserta Kegiatan	:	
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	
Misi/Keterangan	:	
Hasil Kegiatan	:	
Rencana Tindaklanjut	:	
Dokumentasi Kegiatan	:	


2.3 Kegiatan Pokja Papua Produktif BPP Provinsi Papua Pegunungan

Koordinator: Yoyo Iwik Sriyoto,S.Sos.,M.Si




Kegiatan 1	
Nama Kegiatan	: Rapat zoom meeting dengan Kementerian Parekraf mengenai PERMEN EKRAF No. 6 Tahun 2025 dan No. 26 Tahun 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 04 Februari 2026.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut : a. Untuk menjelaskan isi, ruang lingkup, serta perubahan utama dalam Permen Ekraf No. 6 Tahun 2025 dan No. 26 Tahun 2026. b. Untuk menghindari perbedaan tafsir dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. c. Untuk membahas mekanisme pelaksanaan, tata cara pengajuan, pelaporan, pengawasan serta pembinaan sesuai ketentuan regulasi. d. Untuk menghimpun masukan dari daerah/instansi/pelaku usaha terkait kendala implementasi serta merumuskan solusi bersama. e. Untuk menyelaraskan kebijakan Kemenparekraf dengan program daerah agar tidak terjadi tumpang tindih. f. Untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan un tuk memahami kewajiban dan hak sesuai aturan yang berlaku. g. Untuk mempererat koordinasi antara pemangku kepentingan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif.
Peserta Kegiatan	: Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu : 1. Deputy Strategi Development Of ECRAF 2. Host (Helmi & Ismi) 3. KEMENKRAF (Hayun) 4. Penyalur KUR (Gunawan Pribadi) 5. Kepala Pusat Data KEMENKRAF
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	: SHEK
Misi/Keterangan	: Papua Produktif
Hasil Kegiatan	: 1. Peserta memperoleh penjelasan terkait ruang lingkup dan ketentuan teknis dalam Permen Ekraf No. 6 Tahun 2025 dan No. 26 Tahun 2026. 2. Tercapainya pemahaman yang selaras antara Pemerintah Pusat dan daerah terkait mekanisme pelaksanaan regulasi. 3. Terhimpunnya berbagai masukan, pertanyaan, serta potensi kendala yang dihadapi dalam penerapan regulasi di daerah.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Disepakatinya langkah-langkah tindak lanjut antara lain penyusunan petunjuk teknis, koordinasi lanjutan antar perangkat daerah serta penyesuaian program dan kegiatan agar sesuai regulasi terbaru. 5. Terbangunnya komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi kreatif secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan diseminasi hasil zoom meeting kepada OPD terkait dan pemangku kepentingan ekonomi kreatif di daerah. 2. Melakukan review dan harmonisasi program kerja agar tidak bertentangan dengan regulasi terbaru. 3. Menetapkan tim kecil untuk mengawal implementasi regulasi di tingkat daerah. 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi serta menyusun laporan perkembangan implementasi. 5. Penyampaian laporan hasil tindak lanjut sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Membangun Perekonomian Umat dari Sektor Peternakan, Perikanan dan Tanaman Pangan melalui Hasil Pendanaan Baznas Kab. Jayawijaya.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Baznas Kab. Jayawijaya pada tanggal 10 Febuari 2026
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi umat yang didanai BAZNAS dengan program pemerintah daerah di sektor peternakan, perikanan, dan tanaman pangan. 2. Untuk mengoptimalisasi pemanfaatan dana zakat seperti memastikan pendanaan yang bersumber dari zakat, infak, dan sedekah dimanfaatkan secara produktif, tepat sasaran dan berkelanjutan. 3. Untuk menetapkan skema pemberdayaan berbasis usaha produktif.

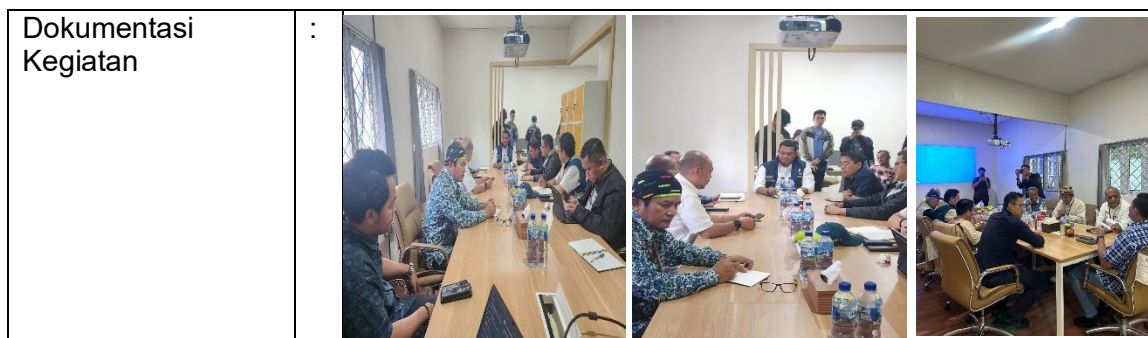
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan. 5. Untuk membangun sinergi antara BAZNAS , OPD teknis, pendamping lapangan, dan kelompok penerima manfaat. 6. Untuk menetapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi agar program berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. 7. Untuk menyepakati langkah operasional, jadwal pelaksanaan, serta pembagian tugas masing-masing pihak.
Peserta Kegiatan	:	<p>Adapun peserta dalam kegiatan ini sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Baznas dan Pengurus 2. Ketua MUI 3. Ketua DMI 4. Tokoh Muslim 5. Panitia Amil Zakat 6. Pelaku Usaha 7. Kemenag
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	<p>Adapun hasil dari kegiatan ini yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua peserta memahami arah, tujuan, dan mekanisme pendanaan Baznas untuk pemberdayaan ekonomi umat di sektor peternakan, perikanan, dan tanaman pangan. 2. Disepakatinya skema bantuan produktif, termasuk ternak bergulir, budidaya ikan, dan pengembangan tanaman pangan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. 3. Terbangun komitmen sinergi antara Baznas dan OPD teknis, pendamping lapangan, dan kelompok penerima manfaat untuk pelaksanaan program yang efektif.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi program ke tingkat lapangan 2. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan 3. Penetapan skema bantuan produktif 4. Pembentukan tim koordinasi pelaksanaan 5. Monitoring dan evaluasi berkala 6. Laporan hasil implementasi
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Kolaborasi Para Pelaku Usaha Umkm Dengan Panitia Liga 4 Saat Pembukaan Pertandingan Liga 4 Wilayah Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan ini dilaksanakan di Stadion Pendidikan Wamena pada tanggal 14 Februari 2026
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini yaitu sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada penonton dan masyarakat luas selama acara pembukaan Liga 4. 2. Untuk menjalin kolaborasi antara dunia olahraga dan sektor UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. 3. Untuk menghadirkan UMKM sebagai bagian dari hiburan dan kegiatan sosial olahraga sehingga masyarakat lebih tertarik untuk berinteraksi dan membeli produk lokal. 4. Untuk memberikan wadah dan pengalaman bagi pelaku usaha untuk belajar memasarkan produk dalam event berskala provinsi. 5. Untuk menunjukkan bahwa Liga 4 wilayah Provinsi Papua Pegunungan tidak hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. 6. Untuk memfasilitasi interaksi antara pelaku UMKM, panitia liga, dan pihak sponsor atau pihak terkait lainnya untuk peluang kerjasama lebih lanjut.
Peserta Kegiatan	:	Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur Provinsi Papua Pegunungan (diwakili Ast. 3) 2. Bupati dan Wakil Bupati Kab. Jayawijaya 3. Bupati dan Wakil Bupati 8 Kabupaten 4. Perwakilan PSSI Pusat 5. Kadispora 8 Kabupaten 6. Ketua Cabor Pengprov 7. 12 Tim Club Sepakbola 8. Tokoh Adat dan Masyarakat
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang dilaksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya partisipasi UMKM dalam event pembukaan 2. Peningkatan promosi dan penjualan produk lokal 3. Terbangunnya sinergi olahraga dan ekonomi lokal 4. Meningkatnya antusiasme dan kemeriahan acara 5. Terjalinnya jaringan dan peluang kerja sma baru 6. Penguatan citra event

Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi bersama antara panitia dan pelakuUMKM untuk menilai kelebihan, kendala, serta dampak ekonomi dihasilkan 2. Penataan dan standarnisasi area UMKM 3. Melakukan pendataan resmi UMKM yang terlibat serta memeberikan pembinaan terkait pengemasan, promosi dan pelayanan. 4. Mengikutsertakan lebih banyak pelaku usaha lokal pada event selanjutnya agar dampak ekonomi semakin luas 5. Pengembangan kemitraan dengan sponsor
Dokumentasi Kegiatan	: <div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>

Kegiatan 4	
Nama Kegiatan	: Rapat Koordinasi Dan Audensi Bp3okp Bersama Dirjen Tkpr - Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman Mengenai Rencana Pembangunan Rumah 2.200 Unit Di Delapan Kabupaten Di Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	: Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan. pada tanggal 26 & 28 Februari 2026
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	: <p>Adapun tujuan kegiatan ini sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menyelaraskan rencana pembangunan 2.200 unit rumah dengan kebijakan dan program Direktorat Jenderal TKPR pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2. Untuk membahas mekanisme perencanaan, lokasi pembangunan, tahapan pelaksanaan, serta dukungan teknis dan administrasi. 3. Untuk mengklarifikasi sumber pendanaan, pola bantuan, serta kemungkinan dukungan pemerintah pusat bagi Delapan Kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. 4. Untuk menetapkan kriteria masyarakat penerima rumah agar tepat sasaran dan sesuai regulasi. 5. Untuk membangun komitmen bersama antara BP3OKP, Dirjen TKPR, dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan perumahan.


		6. Untuk menyepakati jadwal, pembagian peran, serta langkah strategis guna memastikan realisasi pembangunan berjalan efektif dan tepat waktu.
Peserta Kegiatan	:	Adapun peserta dalam kegiatan ini : 1. Rombongan Tim Direktur Jenderal TKPR - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Kepala KPPN Wamena dan Tim 3. Tim BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan 4. Tim Rombongan Kementerian PKP Provinsi Papua 5. Anggota Staff PUPR Provinsi Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	Adapun hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut : 1. Tercapainya kesepahaman antara BP3OKP dan Dirjen TKPR mengenai urgensi pembangunan 2.200 unit rumah sebagai bagian dari percepatan penyediaan hunian layak di Provinsi Papua Pegunungan. 2. Rencana pembangunan akan disesuaikan dengan kebijakan, regulasi serta skema program perumahan nasional yang berlaku. 3. Disepakati perlunya penyampaian data teknis, kesiapan lahan, dan usulan lokasi dari delapan kabupaten untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. 4. Dibahas mekanisme pengusulan program, kemungkinan dukungan anggaran pusat, serta tahapan administratif yang harus dipenuhi. 5. Ditekankan pentingnya validasi data calon penerima agar program tepat sasaran dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	1. BP3OKP bersama pemerintah kabupaten segera melengkapi dan menyampaikan data teknis, kesiapan lahan, legalitas tanah, serta data calon penerima manfaat. 2. Melakukan verifikasi bersama terhadap lokasi usulan pembangunan di delapan kabupaten untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria program nasional. 3. Penyusunan proposal dan skema pembiayaan. 4. Membentuk tim kecil antara BP3OKP Direktoral Jenderal TKPR, dan pemerintah daerah untuk mempercepat proses perencanaan dan administrasi. 5. Menetapkan agenda rapat teknis lanjutan guna memantau progres pengusulan dan persiapan pelaksanaan. 6. Melakukan koordinasi intensif hingga terbitnya persetujuan dan penetapan program pembangunan 2.200 unit rumah. 7. Menyusun mekanisme pelaporan perkembangan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian pelaksanaan program.



Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Dan Sosialisasi Pemberdayaan Dan Promosi Kekayaan Intelektual Para Pelaku Usaha UMKM Dan Parekraf Di Kab. Jayawijaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Sasana Wio Kantor Bupati Jayawijaya pada tanggal 19 Februari 2026
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<p>Adapun tujuan kegiatan ini sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memberikan edukasi kepada pelaku UMKM dan Parekraf mengenai pentingnya perlindungan hak merek, hak cipta, desain industri, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya. 2. Untuk memotivasi pelaku usaha untuk mendaftarkan merek dan karya mereka guna memperoleh perlindungan hukum. 3. Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk UMKM melalui kepemilikan dan pengelolaan kekayaan intelektual. 4. Untuk menyatukan peran pemerintah daerah, instansi terkait, dan pelaku usaha dalam mendukung perlindungan serta promosi KI. 5. Untuk mendorong pemasaran produk UMKM dan parekraf yang telah memiliki perlindungan hukum agar lebih dipercaya pasar. 6. Untuk mendukung pengembangan sektor UMKM dan parekraf sebagai pilar eko
Peserta Kegiatan	:	<p>Adapun peserta dalam kegiatan ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemhum Provinsi Papua Pegunungan 2. Ketua Dekrasnada dan Pengurus 3. Ketua TPPKK dan Pengurus 4. Pelaku Usaha UMKM dan Ekraf 5. Dinas Parekraf 6. Dinas Perdagangan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Produktif

Hasil Kegiatan	:	Adapun hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaku UMKM dan parekras memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hak cipta, hak merek, desain industri, dan perlindungan KI lainnya. 2. Peserta menyadari pentingnya mendaftarkan produk dan karya mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum. 3. Terhimpun daftar produk UMKM dan parekras yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai kekayaan intelektual. 4. Terbangun sinergi antara pelaku usaha, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam mendukung perlindungan promosi KI. 5. Produk-produk yang telah teridentifikasi sebagai KI mulai diperkenalkan secara lebih luas melalui kegiatan sosialisasi.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan teknis pendaftaran KI 2. Membuat daftar produk UMKM dan parekras yang telah dan akan didaftarkan sebagai KI untuk mempermudah monitoring dan promosi. 3. Mengoptimalkan pemasaran produk berbasis KI melalui pameran, media sosial, marketplace, dan event lokal maupun provinsi. 4. Memperkuat sinergi antara pelaku usaha, dinas terkait, BUMN/BUMD, dan lembaga pemberdayaan ekonomi kreatif untuk mendukung perlindungan KI. 5. Menyusun mekanisme evaluasi progres pendaftaran dan pemanfaatan KI agar program berjalan efektif dan berdampak nyata bagi pelaku usaha.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 6		
Nama Kegiatan	:	Kolaborasi Dan Kunjungan Pembukaan Kegiatan Festival Ramadhan Tahun 2026 Bagi Para Pelaku Usaha UMKM Dan Ekraf Sektor Kuliner Di Kab. Jayawijaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan ini dilaksanakan di Wamena Mall pada tanggal 19 Februari 2026
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Adapun tujuan kegiatan ini sebagai berikut :

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat dan pengunjung festival. 2. Untuk mendorong kolaborasi antara pelaku usaha dan penyelenggara festival. 3. Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam ekonomi kreatif. 4. Untuk mendukung pemberdayaan pelaku UMKM dan Ekraf. 5. Untuk membangun jaringan dan peluang kerjasama baru. 6. Untuk meningkatkan branding dan daya tarik festival.
Peserta Kegiatan	:	<p>Adapun peserta dalam kegiatan ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Dekrasnada 2. Pengurus TPPKK Kab. Jayawijaya 3. Ketua Ekraf Provinsi Papua Pegunungan 4. Kepala RRI Wamena 5. Pengurus Darma Wanita Kodim & Polres 6. Pelaku Usaha UMKM 7. Usaha Ekraf Kuliner dan Masyarakat Kab. Jayawijaya
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	<p>Adapun hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemahaman tentang kekayaan intelektual 2. Kesadaran pelaku UMKM dan pihak lokal terhadap perlindungan kekayaan intelektual. 3. Dorongan terhadap perlindungan hukum produk lokal 4. Pemerintah daerah (termasuk Dekranasda dan OPD terkait) terdorong untuk mendata dan memetakan potensi kekayaan intelektual lokal sebagai basis strategi pemberdayaan UMKM/Parekraf.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	Memastikan pelaku UMKM dan parekraf tidak hanya mengetahui pentingnya KI, tapi juga mampu mendaftarkan, mengelola, dan memanfaatkan kekayaan intelektual mereka untuk meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk lokal Jayawijaya.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 7		
Nama Kegiatan	:	Audensi Dan Koordinasi Dinas Parekraf Provinsi Papua Pegunungan Mengenai Rencana Program Strategis Pariwisata Dan Program Ekonomi Kreatif Di Delapan Kabupaten Tahun 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Dinas Parekraf Provinsi Papua Pegunungan pada tanggal 23 Februari 2026
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Adapun tujuan kegiatan ini sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menyatukan persepsi dan strategi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten mengenai arah program pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. 2. Untuk meningkatkan peran serta pelaku UMKM serta ekraf dalam memanfaatkan potensi wisata daerah. 3. Untuk memperkuat kolaborasi lintas kabupaten dan stakeholder agar program strategis berjalan efektif dan berdampak langsung pada pembangunan daerah.
Peserta Kegiatan	:	Adapun peserta dalam kegiatan ini : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Kepala Bidang 4. Kasi 5. Staff Dinas Parekraf Provinsi Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	Adapun hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemahaman dan dukungan UMKM & ekonomi kreatif 2. Perencanaan program pengembangan potensi wisata 3. Komitmen antara provinsi dan pemerintah kabupaten untuk lebih intens melakukan komunikasi dan koordinasi dalam pengembangan agenda pariwisata, termasuk meningkatkan konektivitas festival budaya antar kabupaten. 4. Perbaikan integrasi dan keterpaduan program antar kabupaten, termasuk menetapkan program pelatihan bagi pelaku ekraf dan strategi promosi yang lebih modern agar sektor pariwisata dan UMKM kreatif mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan program strategis integrasi 2. Penguatan kolaborasi dan koordinasi 3. Pemberdayaan pelaku UMKM dan Ekraf 4. Promosi Pariwisata dan Ekraf 5. Digitalisasi dan inovasi 6. Monitoring, evaluasi, dan laporan

Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	--

Kegiatan 8		
Nama Kegiatan	:	Kegiatan Siaran Langsung Perbincangan Talk Show RRI Wamena Mengenai Peran Dan Dukungan Pelaku Usaha UMKM, Ekraf Dan Pengusaha OAP Lainnya Dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis/Mbg Di Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Kegiatan ini dilaksanakan di Studio RRI Wamena pada tanggal 21 Februari 2026
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Adapun tujuan kegiatan ini sebagai berikut : 1. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat program makan bergizi gratis yaitu memastikan setiap anak mendapatkan akses makan bergizi demi pertumbuhan sehat dan mencegah stunting di wilayah Papua Pegunungan. 2. Untuk menggambarkan peran pelaku UMKM, ekraf, dan pengusaha OAP 3. Untuk mengajak dialog dan kolaborasi lintas sektor 4. Untuk edukasi terhadap nilai gizi dan ketahanan pangan lokal
Peserta Kegiatan	:	Adapun peserta dalam kegiatan ini : 1. Kepala Siaran 2. Reporter RRI & Staff
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	:	Adapun hasil dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran publik 2. Teridentifikasinya potensi dan kesiapan pelaku usaha lokal 3. Terbangunnya komitmen kolaborasi lintas sektor 4. Terserapnya aspirasi dan masukan masyarakat 5. Penguatan peran media sebagai sarana edukasi dan transparan
Rekomendasi/ Rencana Tindak lanjut	:	1. Pembentukan tim koordinasi teknis MBG berbasis lokal 2. Pendataan dan verifikasi pelaku usaha 3. Pelatihan dan peningkatan kapasitas

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Fasilitas akses permodalan kemitraan 5. Penyusunan SOP dan skema distribusi lokal 6. Monitoring, evaluasi, dan publikasi berkala
<p>Dokumentasi Kegiatan</p>	<p>:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

2.4 Kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP Provinsi Papua Pegunungan
 Koordinator: Paul Wetipo, S,Pd)

Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Design Kurikulum Program Gap Year 2026 Global Training Center (GTC)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2026, bertempat di Kantor Global Training Center (GTC), Wamena
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan persiapan dan penyusunan design kurikulum Program Gap Year pada Campus Global Training Center. • Membangun konsep Campus Global Training Center (GTC) sebagai kampus berasrama. • Mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) untuk pengelolaan Global Training Center, meliputi Direktur, Manager Academic, Manager Operasional, dan Manager Student Life.
Peserta Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pokja Papua Cerdas BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan • Tim Design Kurikulum yang terdiri dari akademisi dan alumni lulusan Amerika sebanyak 10 orang • Tim Expat sebanyak 6 orang • Staf Global Training Center sebanyak 7 orang • Pimpinan Yayasan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Pokja Papua Cerdas.
Hasil Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya kontrak kerja dengan staf alumni lulusan luar negeri terbaik yang berasal dari Papua Pegunungan. • Proses kerja tim design kurikulum menunjukkan hasil yang sangat signifikan hingga akhir bulan Januari 2026. • Tim design kurikulum masih terus melanjutkan pekerjaan hingga target penyelesaian pada tanggal 2 Mei 2026. • Program Global Training Center direncanakan untuk diluncurkan pada tanggal 2 Mei 2026 oleh Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
Rencana Tindaklanjut	:	<ul style="list-style-type: none"> • Tim akan terus melakukan persiapan program hingga tahap finalisasi kurikulum dan sistem pendidikan Program Gap Year. • Diharapkan pada saat program ini dijalankan, Global Training Center dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas akademik yang baik serta karakter yang kuat, sehingga mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dokumentasi
Kegiatan



2.5 Kegiatan Pokja Papua Sehat BPP Provinsi Papua Pegunungan
 Koordinator: Gaad Piranid Tabuni,SP.,M.M)


Kegiatan 1		
Nama Kegiatan	:	Audiensi dan Koordinasi Kerja dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan yang baru Bpk. Titus Kogoya, SKM.SE.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Waktu : Selasa, 3 Februari 2026 Tempat : Ruang Kerja Kepala Dinas Kesehatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Kerja Rencana Prioritas dalam Percepatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Type B Provinsi Papua Pegunungan di Wamena 2. SHEK BP3OKP terhadap Percepatan Kebijakan dan Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan berfokus pada kebijakan, dan Sasaran dan Lokus yang berkolaborasi dengan Program K/L Pemerintah Pusat berbasis RAPP dan RIPP di Provinsi dan 8 Kabupaten Cakupan Provinsi Papua.
Peserta Kegiatan	:	Kolaborasi Pemahaman Kebijakan Pembangunan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Pokja Papua Sehat BP3OKP berdasarkan K/L berdasarkan Program RIPP dan RAPP 2026
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	Sinkronisasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	Pertemuan membahas mengenai Prioritas Pembangunan lebih dititik beratkan pada pendidikan, pembinaan ketrampilan SDM Tenaga Kesehatan, secara berkelanjutan di semua lini, membangun dan menata Manajemen Organisasi dan Administrasi di Dinas hingga di tingkat Puskesmas dan Posyandu dan bekerja berbasis data.
Rencana Tindaklanjut	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesepakatan untuk berkoordinasi setiap bulan 2. Bersama mengawal Percepatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Provinsi Papua Pegunungan sesuai petunjuk Gubernur 3. Mengambil peran langsung pengawasan gizi dalam implementasi Program MBG di Provinsi Papua Pegunungan dan di 8 Kabupaten cakupan Provinsi Papua,

Dokumentasi Kegiatan	:	
----------------------	---	--


Kegiatan 2		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi kerja dalam rangka observasi kondisi dan perkembangan terkini terhadap Sosial budaya, politik dan pembangunan serta kendala dan masalah yang dihadapi di Kabupaten Jayawijaya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Senin, 09 Februari 2026, bertempat di Rumah kediaman Pokja Papua Sehat BP3OKP
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Observasi melalui Wawancara dan Penjelasan serta diskusi tentang Kondisi Perkembangan Sosial, Budaya dan Politik Masyarakat, serta tanggapan masyarakat terhadap pembangunan oleh pemerintah di bidang Kesehatan, pendidikan dan penanganan perekonomian. 2. Hasil Observasi kajian dan analisa dari hasil yang dicapai kinerja Wahana Visi Indonesia yang sudah sedang dan akan dikembangkan di Kabupaten Jayawijaya selama ini, yang lebih dititik beratkan pada penanganan ibu hamil, bayi balita, pemberian makanan bergizi terhadap anak usia dini dan anak SD dan anak Sekolah Minggu melalui mitra gereja-gereja di kabupaten Jayawijaya, menjadi dasar pengembangan program lebih lanjut.
Peserta Kegiatan	:	Bpk. Gaad P.Tabuni - Selaku Pokja Papua Sehat, dan yang telah dan sedang terlibat langsung dalam Program Pengembangan WVI di Kabupaten Jayawijaya selama 30 tahun.
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK

Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	Pihak WVI memberikan apresiasi atas kesediaan untuk berdiskusi dan wawancara. Dan Hasil Wawancara menjadi kajian dan Data dalam kebijakan Pengembangan Program WVI ke deptsn di Kabupaten Jayawijaya
Rencana Tindaklanjut	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan Kerjasama dalam kajian Data Perkembangan Sosial Budaya dan Politik, Keamanan akan terus terus dibangun. 2. Penanganan Pelayanan Masyarakat di bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pengembangan Ekonomi menjadi Prioritas dalam kelanjutan pembangunan berbasis dan dalam kondisi social budaya dan keamanan yang kondusif wajib diupayakan semua pihak .
Dokumentasi Kegiatan	:	


Kegiatan 3		
Nama Kegiatan	:	Pertemuan Gubernur se – Tanah Papua dalam rangka Kolaborasi untuk Perceptan Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua sebagai bagian dari Simposiun Internasional Flora Malesiana dan Konfrensi Nture-Based Climate Solutiun
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada tanggal 12 – 13 Februari 2026, bertempat di Swiss-Bellhotel Manokwari Papua Barat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Pertemuan Gubernur bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan dan kolaaborasi lintas Provinsi dalam menjaga tutupam hutan Papua dan mendorong pembangunan berkelanjutan yang terkoordinatif di seluruhTanah Papua
Peserta Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pdt. Albert Yoku – Kord. BPP BP3OKP 2. Ketua Asosiasi MRP se Tanah Papua 3. Prof.DR.Djohermansyah Djolan, MA 4. Drs Dominggus Mancan, MSi 5. Gubernur dan Staf Provinsi Papua Barat 6. Perwakilan 5 Lima Gubernur se Tanah Papua dan Staf 7. Pengarah BP3OKP 6 Provinsi / Mewakili

		8. Ketua MRP 6 Provinsi dan staf 9. Perwakilan K/L Pusat dan Narasumber 10. Peserta Berjumlah 60 orang lebih hadir
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	Hasil Pertemuan merupakan Rumusan Kesepakatan Bersama Gubernur se Tanah Papua Kolaborasi Percepatan Pembangunan Berkelanjutan “Satu Untuk Enam, Enam Untuk Satu Tanah Papua” yang dirangkum dalam “9 BUTIR KESEPAKATAN MANOKWARI” seperti copyan terlampir. Pokja papua sehat Mewakili Anggota BP3OKP Provinsi ikut serta dalam pembahasan Perumusan Kesepakatan bersama Gubernur se Tanah Papua Kolaborasi untuk percepaatan Pembangunan Berkelanjutan Menjadi mediator pembahasan dan diskusi di meja kerja khusus peserta Provinsi Papua Pegunungan
Rencana Tindaklanjut	:	Pertemuan Gubernur berkelanjutan 6 bulan sekali dengan tuan rumah secara bergilir di 6 Provinsi se Tanah Papua.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 4		
Nama Kegiatan	:	Koordinasi Kerja dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya tentang Program Pembangunan Kesehatan Periode 2025 -2030
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Selasa, 24 Februari 2026, bertempat di Ruang Kerja Kepala Dinas Kesehatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Memahami Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Kebijakan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Jyawijaya Periode 2025-20230
Peserta Kegiatan	:	1. Pj. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jyawijaya 2. Rudianto Aibesa, SKM – Pj Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya 3. Gaad P.Tabuni – Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan

Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Penjelasan Pj. Kepala Dinas, mengakui bahwa sebagai pejabat baru memiliki kebijakan khusus pada prinsip Keterbukaan, Pemerataan, Bersikap diterima dan menerima, Prioritas Pelayanan dengan kasih. 2. Mendata dan mengidentifikasi 10 besar penyakit dan prioritaskan percepatan tindakan penanganan dan pengendalian pasien. 3. Kemiskinan Ekstrem masyarakat Kabupaten Jayawijaya dalam Aspek Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan sangat memprihatikan, sehingga dibutuhkan keberanian setiap insan kesehatan bekerja tanpa pamrih dalam pelayanan kemaanusiaan. 4. Koordinasi dalam kolaborasi pelayanan Dinas Kesehatan dan Pokja Papua Sehat sangat penting dalam percepatan pembangunan kesehatan di kabupaten Jayawijaya
Rencana Tindaklanjut	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberkelanjutan Koordinasi kerja Pokja Papua Sehat dengan Kadiskes Jayawijaya terus dibangun dan ditingkatkan 2. Pendataan 10 Jenis Penyakit dan penurunan angka kasus penderita menjadi prioritas bagi pemerintah dan semua pihak.
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 5		
Nama Kegiatan	:	Perkenalan Diri dan Silaturahmi Kepala Kantor Cabang BPJS Baru Kabupaten Jayawijaya dengan Anggota dan Pokja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Waktu : Jumat, 20 Februari 2026 Tempat : Ruang Rapat BP3OKP
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Perkenalan diri dan silaturahmi Kepala Kantor Cabang BPJS Wamena Kabupaten Jayawijaya dan menjalin hubungan kerjasama Anggota dan Pokja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan

Peserta Kegiatan	:	1. Kepala Kantor Cabang BPJS Wamena dan 3 orang staf 2. Anggota BPP dan 3 Pokja BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan
Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	1. Pertemuan berjalan lancar tercapai membangun kerja dalam koordinasi kerja 2. Kesepakatan bersama percepatan penanganan tunggakan pembayaran kapitasi untuk peserta BPJS/JKN diaktifkan lagi.
Rencana Tindaklanjut	:	1. Membangun kerjasama dan koordinasi yang solute dan 2. Lebih fokus proses pembayaran tunggakan kapitasi oleh pemda 3. Semua penduduk Provinsi Papua dalam cakupan 8 kabupaten memiliki kantua Jaminan kesehatan (BPJS/JKN dll)
Dokumentasi Kegiatan	:	

Kegiatan 6		
Nama Kegiatan	:	Rapat Kunjungan Kerja Dirjen Perumahan Kementerian PUPR terhadap Persiapan Pembangunan 2200 unit Perumahan Rakyat di Provinsi Papua Pegunungan.
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu & Lokasi)	:	Dilaksanakan pada hari Sabtu, 28 Februari 2026, bertempat di Ruang Rapat BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan.
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	:	Pengecekan Persiapan persiapan Pemerintah
Peserta Kegiatan	:	1. Pj. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawija 2. Rudianto Aibesa, SKM – Pj Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya 3. Gaad P.Tabuni – Pokja Papua Sehat BP3OKP Provinsi Papua Pegunungan

Tugas dan Fungsi Kegiatan yang di laksanakan	:	SHEK
Misi/Keterangan	:	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam Penjelasan Pj. Kepala Dinas, mengakui bahwa sebagai pejabat baru memiliki kebijakan khusus pada prinsip Keterbukaan, Pemerataan, Bersikap diterima dan menerima, Prioritas Pelayanan dengan kasih. 2. Mendata dan mengidentifikasi 10 besar penyakit dan prioritaskan percepatan tindakan penanganan dan pengendalian pasien. 3. Kemiskinan Ekstrem masyarakat Kabupaten Jayawija dalam Aspek Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan sangat memprihatikan, sehingga dibutuhkan keberanian setiap insan kesehatan bekerja tanpa pamrih dalam pelayanan kemausiaan. 4. Koordinasi dalam kolaborasi pelayanan Dinas Kesehatan dan Pokja Papua Sehat sangat penting dalam percepatan pembangunan kesehatan di kabupaten Jayawijaya
Rencana Tindaklanjut	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberkelanjutan Koordinasi kerja Pokja Papua Sehat dengan Kadiskes Jayawijaya terus dibangun dan ditingkatkan 2. Pendataan 10 Jenis Penyakit dan penurunan angka kasus penderita menjadi prioritas bagi pemerintah dan semua pihak.
Dokumentasi Kegiatan	:	

BAB III PENUTUP

Penerapan Otonomi Khusus di Papua telah memasuki tahap baru dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan didukung oleh pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BPP) melalui Perpres Nomor 121 Tahun 2022. Tugas utama BPP mencakup sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan di Papua. Selain berfokus pada pembangunan fisik dan kesejahteraan, BPP juga berkomitmen memastikan partisipasi aktif masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), dan menjembatani kebutuhan mereka dengan kebijakan pemerintah pusat. Di bawah rencana induk yang terukur melalui Perpres Nomor 24 Tahun 2023, BPP berperan penting dalam mengarahkan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi implementasi Otsus Papua.

Dengan adanya BPP yang memiliki wewenang dan struktur yang jelas, diharapkan percepatan pembangunan di Papua dapat terlaksana sesuai dengan rencana induk yang telah disusun hingga tahun 2041. Kerjasama lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat Papua sangat diperlukan agar pelaksanaan Otsus dapat memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan, kualitas hidup, serta kesetaraan bagi seluruh masyarakat Papua. Evaluasi berkala dan pelibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi khusus ini untuk mewujudkan Papua yang lebih sejahtera, damai, dan produktif.

Kegiatan yang di lakukan oleh BP3OKP dalam hal ini anggota dan juga masing-masing pokja berhubungan dengan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi dan Koordinasi terutama dalam era kepemimpinan baru Gubernur dan Bupati diharapkan BP3OKP dapat mengambil peran penting dalam pembangunan di Papua Pegunungan.

Wamena, 8 Maret 2025
BP3OKP
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN



HANTOR MATUAN, S.IP